

Bagaimana Ide Smart City Berpindah Antar Negara

STUDI KASUS ASEAN SMART CITY NETWORK





Penulis

Alifian Arrazi

Editor

Alfredo Putrawidjoyo

Desainer & Tata Letak

Ahmad Nur Hasan

“Setiap negara memiliki permasalahan, dan setiap negara berpikir bahwa permasalahannya unik”

Akhir-akhir ini, pembuat kebijakan sedang mencari ide secara global untuk memecahkan permasalahan nasional dan lokal. Sejak dulu, kebijakan negara sejatinya dipahami sebagai ranah dari aktor politik lokal dan nasional. Walaupun begitu, kehadiran globalisasi mau tidak mau membuat pembuat kebijakan melirik ide global yang mungkin berasal dari daerah lain. Dalam literatur kebijakan publik, fenomena ini sering dibahas dalam konsep transfer kebijakan (*policy transfer*). Singkatnya, konsep transfer kebijakan berfokus pada dinamika kebijakan, terlebih pada aktor, proses, dan institusi yang memungkinkan ide atau kebijakan untuk berpindah antar negara dan diadopsi sebagai kebijakan. Pada negara berkembang, minat terhadap proses transfer kebijakan didorong dari kebutuhan negara tersebut untuk melakukan pertumbuhan. Dalam mencapai pertumbuhan, negara seringkali dipaksa untuk mengadopsi institusi, peraturan, maupun kerangka dari negara lain untuk menghadirkan pertumbuhan dan stabilitas.¹

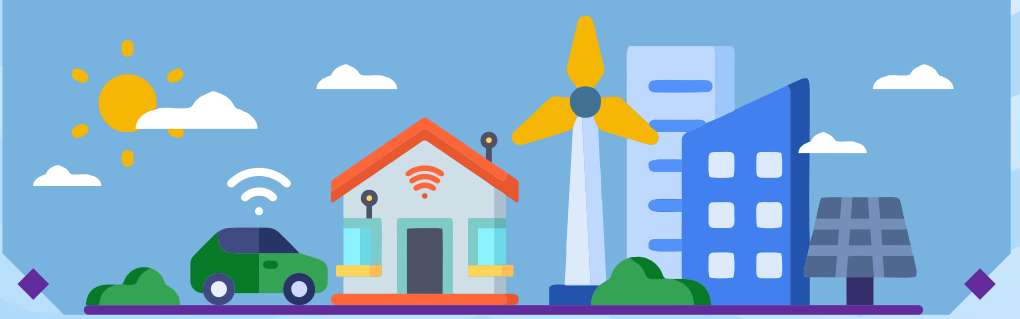
Akhir-akhir ini, praktik transfer kebijakan sering dijadikan instrumen yang dipakai oleh pembuat kebijakan lokal sebagai cara untuk memecahkan permasalahan perkotaan yang muncul. Dari menyebarnya ide mengenai *bus rapid transit* hingga adanya gerakan desa baru (*saemul udong*) di Korea, proses transfer kebijakan yang berasal dari daerah lain telah mengubah lanskap perkotaan dan dinamika kebijakan didalamnya.² Belakangan ini, ide kota cerdas (*smart city*) muncul sebagai salah satu ide yang dianggap sebagai ide yang dapat memecahkan hampir semua permasalahan perkotaan. Dengan menelusuri publikasi mengenai kota cerdas, dapat dilihat bahwa publikasi jurnal terindeks dalam topik ini menghasilkan 12.800 publikasi mengenai topik smart city.³ Kehadiran publikasi yang masif mengenai kota cerdas juga didorong dari kehadiran dukungan organisasi internasional, yang mempromosikan ide tersebut dan mendorong kota agar lebih cerdas, melalui jasa konsultasi yang dihasilkannya. Disamping itu, kehadiran forum jaringan kota yang mendiskusikan topik serupa juga semakin membuat ide tersebut tersebar lintas negara secara masif.

Salah satu jaringan kota yang membahas kota cerdas di kawasan asia tenggara adalah ASEAN smart city network (ASCN). Dididirikan pada saat pertemuan ASEAN yang ke-32, ASCN adalah jaringan kota cerdas yang berisi kota pilihan di ASEAN untuk memfasilitasi kolaborasi dalam pertumbuhan kota cerdas dengan menjalankan kolaborasi antar kota, mendorong proyek bersama pihak swasta, dan mendapatkan pendanaan untuk proyek kota cerdas dari mitra eksternal ASEAN.⁴ Singkatnya, ASCN menjadi saluran diskusi “praktik terbaik” dari pembangunan perkotaan yang dapat digapai melalui kemajuan teknologi dan kemitraan antar institusi. Sebagai jaringan kota cerdas, ASCN memfasilitasi hingga tiga kota di negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN untuk bergabung kedalam jaringan kota ASCN. Saat ini, terdapat 26 kota dari 10 negara ASEAN yang menjadi pilot project dari jaringan kota ASCN. Kota yang tergabung dalam jaringan kota ASCN mencakup kota destinasi wisata, seperti Phuket dan Banyuwangi, hingga kota metropolitan seperti Jakarta dan Bangkok.



Gambar 1. Jaringan kota cerdas di ASEAN

Sumber: asean.org/our-communities/asean-smart-cities-network



Walaupun kota cerdas tidak memiliki penjelasan spesifik mengenai tahapan implementasi dan peta jalannya, secara konsensus, kota cerdas dapat didefinisikan sebagai penggunaan teknologi untuk memberikan pelayanan perkotaan yang lebih baik dan memecahkan permasalahan perkotaan. Dalam kasus ASCN, terdapat tiga ide didalam peta jalan kota cerdas yang digagas, yaitu: (1) tingginya kualitas hidup, (2) ekonomi yang kompetitif, dan (3) perekonomian yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, peta jalan ASCN bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan kota dan pembangunan di kawasan Asia Tenggara sekaligus mendorong kota di ASEAN agar bisa lebih proaktif. Saat ini, terdapat enam area yang didiskusikan dalam inisiatif kota cerdas ASCN, mulai dari: sosial masyarakat, kesehatan, hingga inovasi dan industri. Pada akhirnya, sebagai proyek jaringan kota cerdas di ASEAN, ASCN memiliki visi untuk berkontribusi dalam cetak biru komunitas ASEAN, konektivitas, dan integrasi diberbagai negara di Asia Tenggara.

Walaupun ide bahwa ASCN mempromosikan ide kota cerdas di kawasan sudah relatif diterima dalam kalangan akademik, tetapi masih sedikit tulisan yang melihat bagaimana ide tersebut dapat bergerak dari satu kawasan ke kawasan lainnya. Menggunakan kacamata transfer kebijakan, artikel ini berupaya untuk memahami ide, proses, institusi, dan aktor dalam membentuk diskursus dan pengadopsian kota cerdas di Asia tenggara. Secara spesifik, artikel ini akan mengeksplorasi ide dibalik kehadiran jejaring kota cerdas, melacak agen penting yang bermain, dan menentukan bagaimana ide kota cerdas dapat bermigrasi. Disamping itu, tulisan ini juga akan mengilustrasikan beberapa hambatan yang mungkin muncul dari proyek ASCN.

Bagian selanjutnya dalam tulisan ini akan mengenalkan konsep transfer kebijakan dan mendiskusikan beberapa diskursus didalam teori ini. Selanjutnya, bagian ketiga akan berfokus untuk melihat beberapa motif yang memicu pendirian jejaring kota cerdas. Pada bagian keempat, tulisan akan menganalisis aktor yang muncul dan melihat bagaimana mereka melakukan transfer kebijakan di lingkup regional. Terakhir, bagian kelima akan membahas beberapa tantangan yang mungkin muncul dari proses transfer kebijakan di ASCN.

Memahami Transfer Kebijakan

Pada esensinya, proses transfer kebijakan adalah bagaimana membuat suatu ide yang bekerja di suatu sistem politik yang dipakai kedalam pembangunan serupa pada sistem politik yang berbeda.⁵ Secara umum, studi transfer kebijakan berasal dari konsep *policy diffusion* yang berasal dari area kajian kebijakan komparatif.⁶ Beberapa konsep yang serupa mengenai transfer kebijakan telah dibahas dalam literatur, seperti: konvergensi kebijakan,⁷ difusi kebijakan,⁸ emulasi kebijakan,⁹ hingga melalui jaringan pemikiran transnasional.¹⁰ Dalam tulisannya, Evans (2009) mengkategorisasikan transfer kebijakan kepada tiga tipe utama.¹¹

Pertama, terdapat kebijakan transfer sukarela yang berarti kegiatan transfer kebijakan hadir karena akibat respon internal atas buruknya performa dari pemerintah. Kedua, terdapat transfer kebijakan semi-terpaksa dimana terdapat tuntutan bagi pemerintah untuk mentransfer kebijakan atas kebutuhan dari pemerintah lain, institusi supranasional, atau institusi internasional. Terakhir, terdapat proses transfer kebijakan secara koersif dimana transfer tersebut sangat dipaksa oleh entitas eksternal.¹² Dalam melihat transfer kebijakan, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan. Dolowitz and Marsh (2000) membangun peta transfer kebijakan sebagai salah satu alat untuk melihat proses transfer kebijakan.¹³ Alat tersebut berisi delapan pertanyaan yang dapat ditanyakan untuk membantu peneliti dalam melihat proses transfer kebijakan.

1

Mengapa melakukan transfer kebijakan?
Mengapa organisasi publik ikut serta dalam transfer tersebut?

2

Siapa yang terlihat didalam proses transfer kebijakan?

3

Apa yang ditransfer?

4

Dari mana transfer tersebut terjadi?

5

Apa saja hambatan dari proses transfer?

6

Bagaimana membuktikan kehadiran transfer kebijakan?

7

Apakah transfer mengarah kepada keberhasilan atau kegagalan kebijakan?

Bagian berikutnya akan menggunakan pertanyaan ini untuk menemukan jawaban mengenai proses transfer kebijakan yang berlangsung di ASCN.

Mengupas Perkembangan Ide dalam Jaringan Kota Cerdas ASEAN

Dalam melihat ide yang melatarbelakangi ASCN, perspektif transfer kebijakan melihat adanya logika perbandingan performa pemerintah dalam pembentukan jejaring kota cerdas di ASCN. Sejalan dengan konsep transfer kebijakan sukarela, ketika suatu negara merasa tertinggal dari negara tetangga, mereka akan lebih terdorong untuk mengadopsi kebijakan serupa yang telah menghasilkan kesuksesan dari negara lain. Dalam kasus ASCN, kehadiran proyek kota cerdas di beberapa negara ASEAN berhasil mendorong pembentukan dari jejaring kota ini. Sebagai contoh, kota seperti Jakarta (Indonesia), Kuala Lumpur (Malaysia), dan Bangkok (Thailand) telah mengembangkan kota cerdas jauh sebelum adanya pembentukan ASCN. Bahkan, kota Kuala Lumpur sendiri sudah mengembangkan proyek kota cerdas sejak 1996. Walaupun pengembangan kota cerdas sudah muncul sejak lama di kawasan ASEAN, tetapi terdapat perbedaan performa dan efektivitas dalam pengimplementasian kota cerdas dengan performa jarak yang cukup jauh. Melalui survei *smart city observatory Index* yang dilakukan oleh IMD-SUTD, dapat terlihat bahwa Singapore menempati urutan pertama dalam penyelenggaraan kota cerdas sementara kota seperti Kuala Lumpur berada di posisi 74.¹⁴ Disamping alasan untuk mencari ide dalam membangun kota cerdas, pembentukan ASCN juga didorong oleh tuntutan untuk mempromosikan citra positif atas kota-kota metropolitan di ASEAN yang ingin dicartakan sebagai kota global dengan pondasi teknologi dalam memecahkan permasalahan perkotaan. Hal ini dapat dilihat dalam kasus pembentukan awal ASCN dimana Singapore menjadikan forum tersebut sebagai ekstensi dari proyeksi kekuasaan secara halus.¹⁵ Sebagai pendiri dari ASCN, Singapore mengambil momentum untuk mencitrakan perkembangan kota cerdasnya maupun kemajuan teknologinya di kawasan, maupun kepada dunia, dengan mendirikan jaringan kota cerdas tersebut.

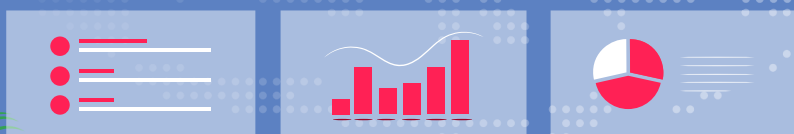
Agen dan Lajur Transfer Kebijakan Ide Smart City di ASCN

Agensi memiliki peran yang krusial dalam mentransfer kebijakan lintas negara. Dalam literatur transfer kebijakan, terdapat tiga jenis agen yang memiliki peran penting dalam mentransfer kebijakan maupun ide.¹⁶ Pertama, terdapat lengan birokrasi yang dapat mengimpor ide sekaligus juga mengimplementasikannya dalam rezim yang dilingkupinya. Selanjutnya, terdapat agen akademisi, seperti lembaga riset dan konsultan, yang memainkan peran dalam menciptakan pengetahuan dan dapat mempromosikan suatu ide. Ketiga, terdapat perusahaan swasta transnasional yang memainkan peran besar dalam menjalankan proyek pembangunan yang dapat memengaruhi konteks kebijakan secara langsung.

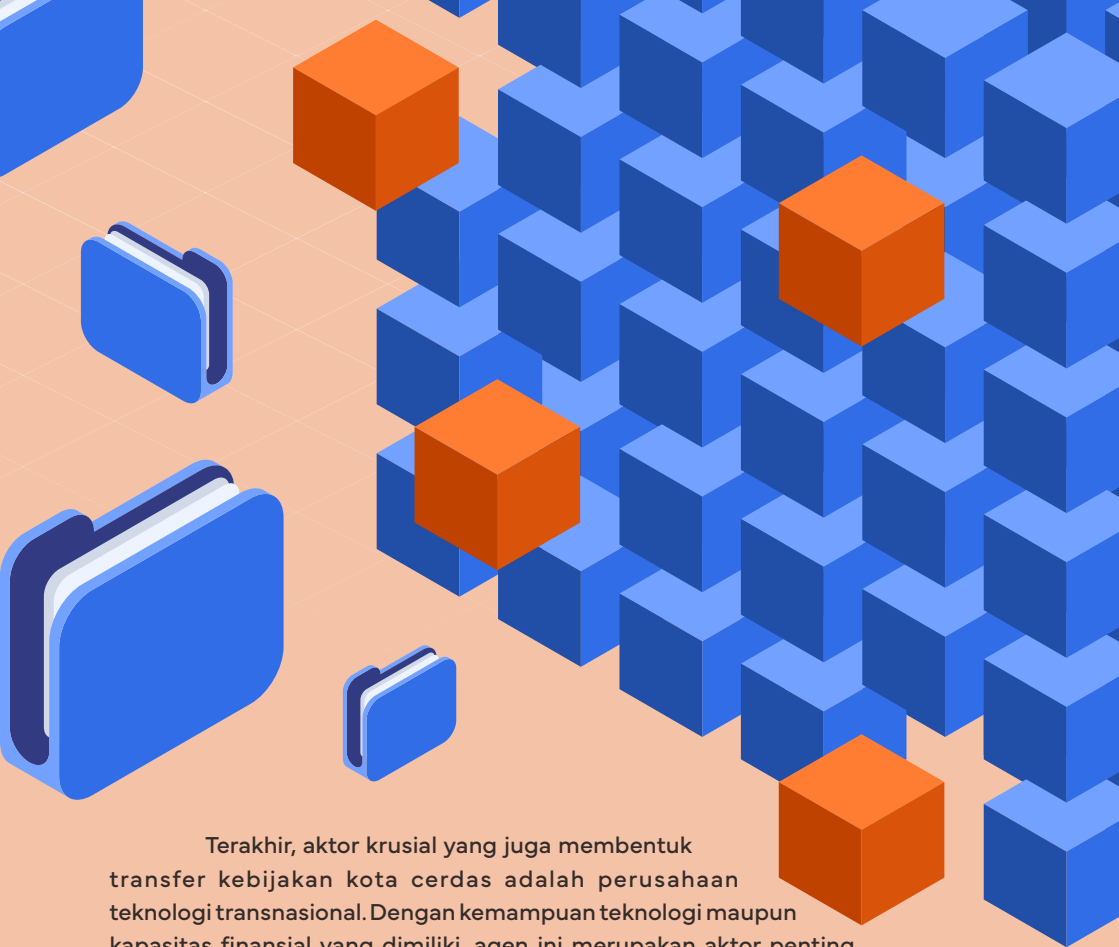
Dalam kasus ASCN, ketiga agen terlihat memiliki peran yang signifikan. Pertama, birokrasi level nasional, yang diwakili oleh perwakilan nasional (*national representative*), memainkan peran besar dalam proses transfer kebijakan. Sebagai aktor yang juga menempati jabatan sebagai ketua ASEAN maupun ketua ASCN, birokrasi level nasional dapat mempromosikan ide kota cerdas yang mengarah kepada suatu paham, paradigma, maupun permasalahan. Sebagai contoh, dalam Singapore ASCN 2018 forum, kebanyakan diskursus dalam inisiatif ASCN lebih banyak berfokus kepada permasalahan kemitraan bersama industri dalam membangun kota cerdas.¹⁷ Setahun kemudian, dalam forum ASCN yang diselenggarakan oleh Thailand, perwakilan Thailand dari birokrasi pusat yang menyelenggarakan ASCN mengubah diskursus dari acara ASCN untuk mendiskusikan aspek kota ramah kehidupan (*liveable cities*) dalam membangun kota cerdas di ASCN.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa birokrasi pusat ataupun level nasional yang mengorganisasikan ASCN dapat menjadi agen vital dalam menyebarkan ide didalam forum ASCN.

Untuk agen birokrasi lokal, struktur organisasi dari jejaring kota cerdas ASCN memberikan tempat bagi birokrasi lokal untuk berpartisipasi di forum regional ASCN. Kehadiran Chief Smart City Officer (CSCO), perwakilan birokrat lokal dari kota cerdas yang berpartisipasi, secara rutin berkoordinasi dalam pendiskusiian maupun promosi dari ide smart city. Disamping itu, CSCO juga berperan besar dalam membangun rencana aksi kota cerdas maupun mendiskusikan *framework* dari ASCN.¹⁹

Untuk kedua agen birokrasi, secara umum, jalur transfer kebijakan hadir melalui forum diplomasi kota formal (Pertemuan tahunan ASCN) atau pertemuan antar kota semi-formal (Pertemuan antar CSCO). Dalam pertemuan tahunan ASCN, birokrasi nasional dapat mempromosikan ide kota cerdas maupun mendapat ide untuk dari pembuat kebijakan lainnya. Bagi negara yang belum memiliki referensi mengenai kota cerdas, forum pertemuan nasional dapat menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan makro mengenai kota cerdas. Disamping itu, melalui pertemuan antar kota semi-formal, agen lokal tidak hanya bisa mendapatkan referensi, tetapi juga bisa langsung mengimplementasikan proyek smart city dengan menggunakan referensi yang telah didapat.



Terkait agen transfer kebijakan berjenis akademisi, setidaknya terlihat dua tipe agen akademisi yang berpartisipasi didalam forum ASCN. Pada agen pertama, lembaga riset (*think tank*), yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta, berperan dalam memberikan ide dan pengetahuan mengenai kota cerdas yang nantinya dapat diadopsi oleh kota didalam ASCN. Sebagai contoh, the Centre for Livable Cities (CLC), sebuah lembaga riset yang bergerak dalam bidang perencanaan kota yang dimiliki pemerintah Singapore, secara aktif mendiseminasikan hasil riset mengenai kota cerdas didalam forum ASCN. Disamping itu, terdapat juga konsultan, seperti Ernst and Young, juga berpartisipasi dalam pembentukan rancangan implementasi kota cerdas ASEAN yang diterbitkan oleh ASCN. Kehadiran konsultan dalam pembuatan kebijakan lintas negara menandai fenomena 'konsultokrasi' yang muncul belakangan waktu ini dimana konsultan seringkali dipakai untuk memecahkan permasalahan alih-alih menggunakan kapasitas birokrasi yang ada.²⁰ Untuk agen akademisi maupun konsultan, lajur transfer kebijakan dapat terjadi melalui publikasi hasil ide dan pengetahuan dalam suatu produk yang pada akhirnya diadopsi oleh kota di ASCN. Sebagai salah satu kasus, ASEAN smart city framework yang dibuat pada tahun 2018, merupakan hasil produksi bersama dari lembaga riset CLC sekaligus konsultan EY. Kerangka pikir tersebut memberikan garis besar bagaimana pembangunan kota cerdas di kawasan harusnya berjalan. Walaupun kerangka pikir tersebut tidak mengikat terhadap kota cerdas yang bergabung dalam jejaring ASCN, dengan dalih produksi pengetahuan yang berbasis bukti, setidaknya kerangka tersebut dapat memberikan panduan mengenai perkembangan kebijakan kota cerdas di kawasan.



Terakhir, aktor krusial yang juga membentuk transfer kebijakan kota cerdas adalah perusahaan teknologi transnasional. Dengan kemampuan teknologi maupun kapasitas finansial yang dimiliki, agen ini merupakan aktor penting yang bisa menjembatani antara ide yang dimiliki pemerintah dan eksekusi yang ada di lapangan. Hasil dan keputusan tender yang dimenangkan oleh perusahaan swasta dapat menentukan pendekatan teknologi apa yang dipakai dalam pembangunan kota cerdas. Disamping ingin memenangkan tender, perusahaan teknologi transnasional juga seringkali mempromosikan pendekatan mereka dalam memecahkan permasalahan perkotaan. Perusahaan teknologi seperti Huawei sering muncul didalam forum ASCN dan mempromosikan produk teknologi internet tersambung (IoT) yang dimilikinya untuk membantu kota dalam mengintegrasikan data. Bagi perusahaan teknologi transnasional, lajur transfer kebijakan dapat terjadi apabila mereka secara langsung memenangkan kontrak ataupun dipasang oleh forum ASCN untuk menyelesaikan proyek kota cerdas lokal.²¹ Didalam proyek tersebut, mereka dapat mengimplementasikan atau mentransfer ide kota cerdas yang secara langsung membentuk perkembangan kota cerdas di kota tersebut.

Hambatan dalam Transfer Kebijakan Kota Cerdas

Tulisan ini mengidentifikasi tiga hambatan utama yang merestriksi perpindahan ide maupun transfer kebijakan mengenai kota cerdas, yaitu: kesiapan teknologi, diversitas tata kelola, hingga perbedaan sumber daya fiskal.

Pertama, kesiapan teknologi merupakan permasalahan utama yang muncul diberbagai kota yang berpartisipasi di ASCN. Singkatnya, kesiapan teknologi sendiri merupakan pengukuran atas kegiatan individu untuk menggunakan teknologi dalam kesehariannya. Apabila kota memiliki nilai kesiapan teknologi yang tinggi, maka masyarakat akan lebih suportif terhadap inisiatif teknologi yang muncul. Disamping itu, tingginya kesiapan teknologi juga berarti kegiatan perekonomian dalam lanskap teknologi, yang seringkali mendorong inovasi, juga tinggi. Oleh karena itu, apabila kota memiliki nilai kesiapan teknologi yang tinggi, mereka dapat mengimplementasikan kebijakan kota cerdas secara relatif lebih mudah. Walaupun begitu, dengan menggunakan pengukuran kesiapan teknologi oleh laporan World Economic Forum Global Competitiveness tahun 2018 yang melihat bagaimana adopsi teknologi bagi masyarakat maupun inovasi yang hadir dari perusahaan teknologi, negara-negara di ASEAN masih memiliki nilai kesiapan teknologi yang beragam.²² Laporan tersebut menunjukan bahwa adopsi kebijakan kota cerdas akan lebih mudah untuk negara seperti Singapore dan Malaysia, yang sudah memiliki nilai kesiapan teknologi tinggi, dikarenakan ekosistem teknologi mereka suportif akan perkembangan teknologi. Walaupun begitu, bagi pemerintah yang mungkin memiliki skor kesiapan teknologi yang rendah, sangat dipertanyakan apakah mereka dapat mengimplementasikan proyek kota cerdas tanpa ekosistem teknologi yang suportif dari masyarakat maupun pihak swasta. Dari perspektif transfer kebijakan, hambatan ini akan memengaruhi pemangku kebijakan untuk mencari solusi yang lebih praktis alih-alih mentransfer kebijakan *best practice* yang membutuhkan ekosistem teknologi yang lebih dewasa.



No	Negara ASEAN	Index Kesiapan Teknologi
1	 Brunei	4.5/7
2	 Cambodia	3.4/7
3	 Indonesia	3.9/7
4	 Laos PDR	3.0/7
5	 Malaysia	4.9/7
6	 Myanmar	n. a.
7	 Philippines	3.8/7
8	 Singapore	6.1/7
9	 Thailand	4.5/7
10	 Vietnam	4.0/7

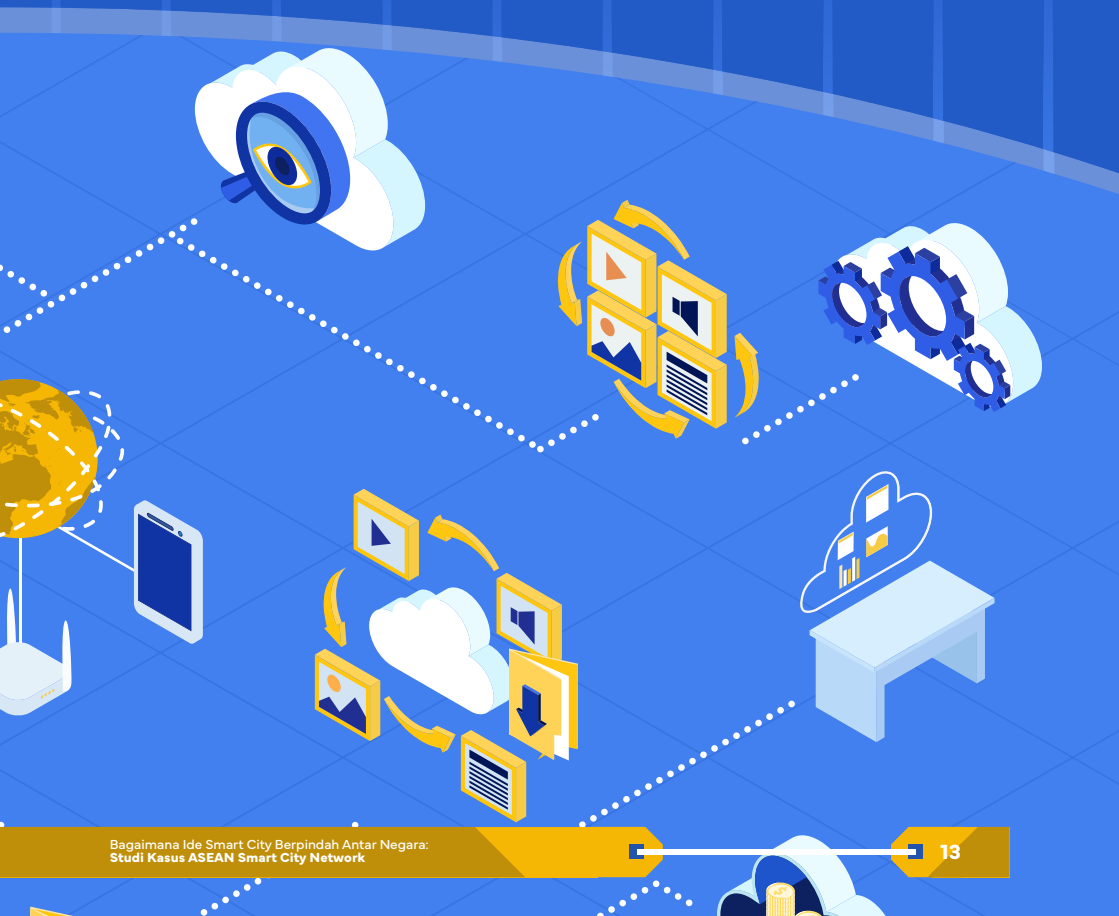
■ Tabel 1. **Komparasi kesiapan teknologi antar negara di ASEAN**

Sumber: **WEF Global Competitiveness Report** tahun 2018

Disamping itu, kehadiran diversitas dalam hirarki maupun tata kelola pemerintah juga dapat menghadirkan permasalahan yang menghambat proses transfer kebijakan di ASEAN. Tidak seperti negara Singapore yang langsung memiliki saluran langsung kepada perdana menteri untuk melaporkan perkembangan kota cerdas, banyak negara di ASEAN memiliki hirarki yang kompleks dalam tata kelola pemerintahannya. Rezim monarki seperti di Thailand dan Brunei, memiliki peran yang besar dalam menunda pengambilan keputusan birokrat lokal dalam mengimplementasikan kebijakan kota cerdas. Penelitian terbaru menjelaskan bagaimana perkembangan kebijakan kota cerdas di Thailand terhambat akibat rezim sentralisasi ketat maupun dekonsentrasi tinggi yang ada di Thailand.²³ Dalam kasus Phuket, lemahnya kapasitas birokrat lokal dalam mengimplementasi kebijakan membuat mereka sangat tergantung atas keputusan yang diberikan oleh birokrat pusat dalam mengimplementasikan kebijakan kota cerdas. Oleh karena itu, kehadiran tata kelola pemerintah yang berlapis dapat menghambat implementasi kebijakan kota cerdas akibat kebutuhan untuk keputusan yang berjenjang dari level birokrasi di atasnya.



Terakhir, perbedaan kapasitas fiskal yang dimiliki oleh negara di ASEAN dalam mensponsori proyek kota cerdas juga dapat menjadi tantangan bagi proses transfer kebijakan didalam ASCN. Sedikitnya kemampuan dalam pembiayaan fiskal untuk membiayai proyek kota cerdas dapat membuat pembuat kebijakan lokal mempertimbangkan opsi yang murah dalam mengeksekusi proposal pembangunan kota cerdas. Sedikitnya kapasitas fiskal juga dapat membuat kota lebih terdorong untuk memprioritaskan sektor yang lebih penting. Sebagai contoh, pemerintah Singapore mengeluarkan hingga 59.5 juta dolar dalam tahun anggaran fiskal 2022 untuk mengimplementasikan proyek-proyek kota cerdas, sementara Jakarta hanya menganggarkan 23 juta dolar walaupun lahan yang dimiliki jauh lebih luas dari Singapore.²⁴ Ketika pengalokasian anggaran sedikit, pembuat kebijakan akan mempertimbangkan kembali proses transfer kebijakan apabila mereka merasa proyek tersebut terlampaui mahal.





Pemangku kebijakan lokal sedang mencari ide secara global agar bisa memecahkan permasalahan perkotaan secara efektif. Studi kasus ASEAN Smart City Network telah memberikan gambaran dari proses institusionalisasi dari gerakan kota cerdas di Asia Tenggara. Dengan menggunakan lensa transfer kebijakan, dapat diketahui bahwa transfer kebijakan yang hadir pada ASCN didorong dari kehadiran momentum pertumbuhan dari gerakan kota cerdas sekaligus adanya tuntutan untuk mempromosikan kota di negara ASEAN untuk dicap sebagai kota ramah teknologi.

Disamping itu, tulisan ini juga menyoroti bahwa terdapat tiga agen transfer kebijakan dalam ASCN. Pertama, terdapat agen birokrasi yang berisi dari birokrasi pusat (nasional) dan daerah (lokal) yang dapat mempromosikan ide kota cerdas maupun langsung mengimplementasikannya pada kota asalnya. Disamping itu, terdapat agen akademik, berisi lembaga riset dan konsultan, yang juga berpartisipasi dalam memobilisasi ide kota cerdas melalui adopsi dari produk pengetahuan yang didistribusikan. Terakhir, terdapat perusahaan teknologi transnasional yang mentransfer kebijakan kota cerdas apabila mereka memenangi tender dan secara langsung mengimplementasikan program kota cerdas.

Walaupun begitu, terdapat beberapa tantangan yang muncul dalam proses transfer kebijakan dalam konteks ASCN. Pertama, ketidakmerataan kesiapan teknologi di negara-negara ASEAN dapat memberikan hambatan bagi pembuat kebijakan dalam mengadopsi kebijakan yang ada. Kota dengan kesiapan teknologi yang rendah akan mengalami tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan kota cerdas karena kurangnya dukungan terhadap ekosistem teknologi. Selanjutnya, adanya diversitas lanskap tata kelola juga dapat membuat proses transfer kebijakan berjalan lebih susah. Apabila terdapat struktur tata kelola yang berlapis, birokrasi lokal dapat tegang oleh “persetujuan” dalam mengimplementasikan kebijakan kota cerdas. Terakhir, disparitas dalam alokasi fiskal terhadap proyek kota cerdas juga dapat menimbulkan permasalahan. Dengan dana yang terbatas, birokrat pada kota yang memiliki alokasi pendanaan kota cerdas yang sedikit perlu lebih kreatif dalam mengambil praktik baik (*best practice*) dari kebijakan kota cerdas.

- ¹ Hadjiisky, Magdaléna, Leslie A. Pal, and Christopher Walker. 2017. *Public policy transfer: Micro-dynamics and macro-effects*. Edward Elgar Publishing.
- ² Hwang, Sungsoo, and Hyojin Song. 2019. Policy transfer and role of policy entrepreneur in international aid: exploring international development cases of Korea and Vietnam. *Policy Studies* 40 (1). Routledge: 1–20;
- Wood, Astrid. 2014. Moving policy: global and local characters circulating bus rapid transit through South African cities. *Urban Geography* 35 (8). Routledge: 1238–1254.
- ³ Crumpton, Charles David, Supawatanakorn Wongthanavas, Peerasis Kamnuansilpa, John Draper, and Eva Bialobrzeski. 2021. Assessing the ASEAN smart cities network (ASCN) via the quintuple helix innovation framework, with special regard to smart city discourse, civil participation, and environmental performance. *International Journal of Urban Sustainable Development* 13 (1). Taylor & Francis: 97–116.
- ⁴ ASEAN Smart Cities Network. 2019. ASEAN Smart Cities Network Advancing Partnership For Sustainability - ASCN 2019.
- ⁵ Dolowitz, David P., and David Marsh. 2000. Learning from abroad: The role of policy transfer in contemporary policy-making. *Governance* 13 (1). Wiley Online Library: 5–23.
- ⁶ Ibid.
- ⁷ Holzinger, Katharina, Christoph Knill, and Bas Arts. 2008. *Environmental policy convergence in Europe: The impact of international institutions and trade*. Cambridge University Press.
- ⁸ Marsh, David, and Jason C. Sharman. 2009. Policy diffusion and policy transfer. *Policy studies* 30 (3). Taylor & Francis: 269–288.
- ⁹ Ibid.
- ¹⁰ Stone, Diane. 2013. *Knowledge actors and transnational governance: The private-public policy nexus in the global agora*. Springer.
- ¹¹ Evans, Mark. 2009. Policy transfer in critical perspective. *Policy studies* 30 (3). Taylor & Francis: 243–268.

- ¹² Hadjiisky, Magdaléna, Leslie A. Pal, and Christopher Walker. 2017. *Public policy transfer: Micro-dynamics and macro-effects*. Edward Elgar Publishing
- ¹³ Dolowitz, David P., and David Marsh. 2000. Learning from abroad: The role of policy transfer in contemporary policy-making. *Governance* 13 (1). Wiley Online Library: 5–23.
- ¹⁴ IMD-SUTD. 2021. IMD-SUTD Smart City Observatory Index. IMD organisation.
- ¹⁵ Tan, Si-Ying, Araz Taeihagh, and Kritika Sha. 2021. How transboundary learning occurs: case study of the ASEAN smart cities network (ASCN). *Sustainability* 13 (11). MDPI: 6502.
- ¹⁶ Hadjiisky, Magdaléna, Leslie A. Pal, and Christopher Walker. 2017. *Public policy transfer: Micro-dynamics and macro-effects*. Edward Elgar Publishing
- ¹⁷ Centre for Liveable Cities. 2018. ASEAN Smart Cities Network.
- ¹⁸ ASEAN Smart Cities Network. 2019. ASEAN Smart Cities Network Advancing Partnership For Sustainability - ASCN 2019.
- ¹⁹ ASEAN, ASEAN. 2018. Concept Note of the ASEAN Smart Cities Network. *ASEAN Main Portal*. Available at <<https://asean.org/concept-note-of-the-asean-smart-cities-network/>>. Accessed 5 February 2023.
- ²⁰ Hodge, Graeme, and Diana Bowman. 2006. The 'consultocracy': The business of reforming government. *Privatization and market development: Global movements in public policy ideas*. Edward Elgar Cheltenham: 97–126.
- ²¹ ASEAN Smart Cities Network. 2019. ASEAN Smart Cities Network Advancing Partnership For Sustainability - ASCN 2019.
- ²² Schwab, Klaus. 2018. The global competitiveness report 2018. World Economic Forum.
- ²³ Sripokangkul, Siwach. 2022. Can Smart Cities Occur under a Rigid Centralization Regime?: Problems of Smart City Policy Implementation in the Case of Phuket, Thailand. *The International Journal of Interdisciplinary Social and Community Studies* 18 (1): 15–31.
- ²⁴ DKI Jakarta. 2021. DKI Jakarta Municipal Budget 2021; Singapore PM Office. 2022. Singapore Head U Prime Minister Office Budget 2022.





Center for Digital Society

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada
Gedung BC Lt. 2, Ruang BC 201-203
Jalan Socio Yustisia 1
Bulaksumur, Yogyakarta, 55281, Indonesia

Telepon: (0274) 563362, Ext. 116
Email: cfds.fisipol@ugm.ac.id
Situs Web: cfds.fisipol.ugm.ac.id

 facebook.com/cfdsugm

 Center for Digital Society (CfDS)

 [cfds_ugm](https://www.instagram.com/cfds_ugm)

 [@cfds_ugm](https://twitter.com/cfds_ugm)

 [@cfds_ugm](https://twitter.com/cfds_ugm)

 CfDS UGM